

**STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON,
BOJONGSARI, PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Bidang Sosiologi

Disusun oleh:

ARIYO SAFTO NUGROHO

NIM. 21107020032

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-5277/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI DI DESA PATEMON, BOJONGSARI, PURBALINGGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIYO SAFTO NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 21107020032
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dwi Nur Laela Fitriya, S.I.P., M.A.
SIGNED

Valid ID: 694b6c2d5d7f1

Pengaji I



Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 694a35de7b008

Pengaji II



Nisrina Muthahari, M.A.
SIGNED

Valid ID: 694b6d4ae9cbe

Yogyakarta, 16 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 694b88ff9f041



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariyo Safto Nugroho

NIM : 21107020032

Prodi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis gunakan sebagai acuan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesunuhnya agar dapat diketahui oleh dosen pembimbing skripsi dan anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 27 November 2025

Yang Menyatakan,



Ariyo Safto Nugroho

NIM : 21107020032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada: Yth Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariyo Safto Nugroho

NIM : 21107020032

Prodi : Sosiologi

Judul : Studi Efektivitas Kebijakan Birokrasi di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Puerbalingga

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosiologi.

Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2025

Pembimbing,

Dwi Nur Laela Fitriya, S.I.P., M.A.

NIP : 19910123 201903 2 013

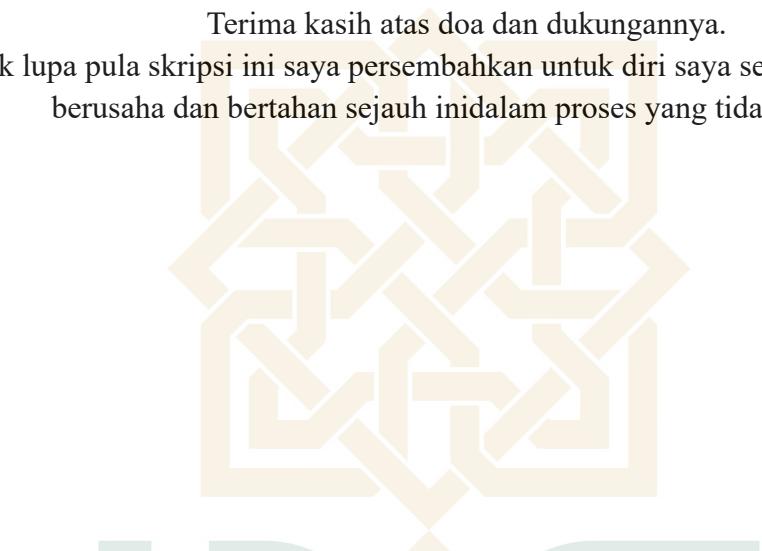
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung saya dalam menempuh gelar Sarjana Sosiologi. Kepada orang tua dan kakak saya tercinta, orang-orang yang telah memberi dukungan selama kuliah, dan Prodi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berusaha dan bertahan sejauh ini dalam proses yang tidak mudah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.”

(Q. S. Al-‘Ankabut: 69)

“Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be”

(Wild Robot: Rozum 7134)

“Kamu itu cuma ada satu, jadilah dirimu sendiri”

(Ibu saya)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya yang senantiasa memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul mizan. Aamiin yarobbal 'alamin.

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Skripsi yang berjudul "Studi Efektivitas Kebijakan Birokrasi di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga" telah selesai disusun. Skripsi ini disadari masih memiliki banyak kekurangan. Namun, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Proses perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis tentu tidak lepas dari bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

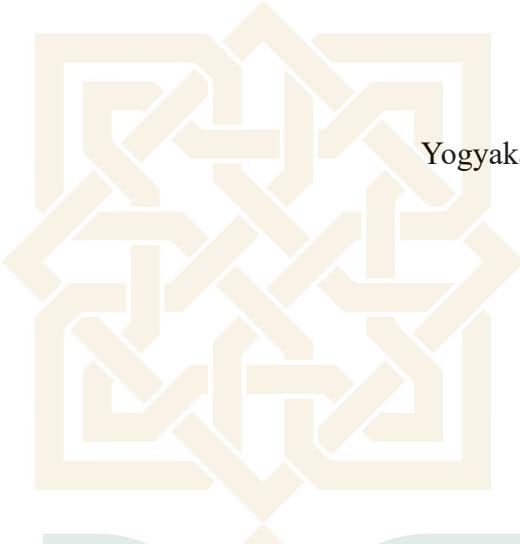
1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Erika Setyanti K. S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmun Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji 1.
5. Ibu Dwi Nur Laela Fithriya, S.IP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih sudah selalu baik dan sabar dalam membimbing saya.
6. Segenap Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama berkuliah.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta. Terima kasih karena telah bangga memiliki saya sebagai seorang anak. Terima kasih pula karena telah memberikan doa serta dukungan agar terus semangat dan bersyukur dalam setiap proses. Terima kasih karena tidak menuntut apapun, selalu menerima, dan selalu mengapresiasi apapun pencapaian diri. Terima kasih atas nasihat baik yang selalu diberikan agar penulis tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah merelakan kebahagiaan dimasa ini untuk kebahagiaan saya karena telah berusaha lebih keras. Mungkin usaha saya ini masih jauh dari sempurna namun, usaha ini saya dedikasikan salah satunya untuk kedua orang tua saya.
8. Kepada kakak, Ririn Apriandani yang telah memberikan dukungan serta memberikan tenaganya dalam membantu perkuliahan penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Terima kasih sebesar-besarnya penulis

sampaikan kepada kakak yang selalu memberi motivasi dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Karisma Wulan Sejati. Terima kasih atas keluamgan waktu, rasa bahagia, arahan, dan dukungan disetiap harinya, Sedari awal perkuliahan hingga proses skripsi ini. Seseorang yang selalu ada untuk menemani, mendukung dan menjadi tempat bercerita penulis serta selalu meyakinkan penulis disetiap saat. Terima kasih karena sudah membuat proses yang berat ini menjadi sedikit lebih ringan. Terima kasih sudah mau berproses bersama, Karisma.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung, menjadi tempat bercerita, dan saling memberikan semangat. Terkhusus sahabat ngopi pagi (Zaky, Nizar, Wahab, Yusuf, dan Alpian) yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat berfikir secara luas dalam menulis skripsi ini. Terima kasih karena bersedia menyumbangkan canda tawa disetiap saat, sukses dan semangat untuk kalian semua.
11. Kepada teman-teman Prodi Sosiologi angkatan 2021, teman-teman korporasi Basudewa PMII FISHUM, dan teman-teman lintas universitas.
12. Kepada seluruh narasumber, pemerintah Desa Patemon, masyarakat Desa Patemon, kepala dusun, dan tokoh masyarakat Desa Patemon yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.

13. Tak lupa, terima kasih untuk diri sendiri yang telah mau untuk berjuang sejauh ini. Tak akan bosan untuk mengingatkan kalau ini bukan akhir, namun sebuah permulaan bagi sesuatu yang besar dimasa depan. Terima kasih, dan tetap berjuang sampai kapanpun.



Yogyakarta, 25 November 2025

Penulis

Ariyo Safto Nugroho

NIM: 21107020032



ABSTRAK

Kebijakan menjadi salah satu aspek yang pasti ada dalam birokrasi guna memberikan keteraturan dalam sebuah sistem. Kebijakan dibentuk dalam satu masa atau periode kepemimpinan sebagai acuan dalam melakukan pola pemerintahan yang ada. Pola tersebut menjadi acuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari apa yang sudah disusun. Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai objek dari kebijakan dan juga sebagai aspek penilaian kebijakan ini efektif atau kurang efektif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap tingkat efektivitas kebijakan, terkhusus kebijakan pembangunan yang ada di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, serta dampaknya bagi keberlangsungan pembangunan di Desa Patemon. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMDes Patemon 2019-2025. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Implementasi Kebijakan milik George Edward III yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam teori ini memiliki kerangka konseptual yang tepat untuk mengkaji mekanisme kebijakan oleh implementor kebijakan. Konsep ini terdiri dari komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Keempat faktor ini saling berkaitan dan terhubung satu sama lain untuk mengukur sejauh mana kebijakan sudah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian ini yakni Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah desa selaku implementor kebijakan juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Segala kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dengan rasionalisasi program juga harus linear. Kepala dusun dan tokoh masyarakat berperan penting sebagai kepanjangan tangan dari perangkat desa kepada masyarakat guna meminimalisir kesalahpahaman akan sebuah kebijakan yang telah maupun akan dilaksanakan. Dan masyarakat desa sebagai objek sekaligus ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang harus masif dalam bentuk partisipasi guna mengukur tingkat keefektivitasan kebijakan pembangunan yang sudah dirumuskan.

Kata kunci: Kebijakan, Efektivitas, Pemerintah Desa, Masyarakat desa

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori.....	31
1. Definisi Konseptual.....	31
2. Teori Implementasi Kebijakan	38
3. Kerangka Berpikir	44
G. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Lokasi Penelitian	47
3. Subjek dan Objek Penelitian	48
4. Sumber Data.....	48
5. Teknik Pengumpulan Data	49
6. Validitas Data (Triangulasi).....	53
7. Analisis Data	54

H. Sistematika Penulisan	56
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	58
A. Kabupaten Purbalingga	58
1. Sejarah dan Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga	58
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.....	59
B. Kecamatan Bojongsari	61
1. Kondisi Wilayah dan Administrasi.....	61
2. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Bojongsari.....	62
C. Desa Patemon	64
1. Letak Geografis dan Kependudukan	64
2. Visi & Misi Desa Patemon	65
D. Permasalahan Pembangunan dan Pelaksanaan Kebijakan Desa	66
E. Profil informan.....	69
BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA PATEMON.....	78
A. Efektivitas Kebijakan Pembangunan Di Desa Patemon	78
1. Kebijakan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa Patemon.....	78
2. Kebijakan Revitalisasi Oleh Pemerintah Desa Patemon.....	83
3. Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Desa Patemon	87
B. Model Kebijakan Pembangunan Oleh Pemerintah Desa Patemon... 90	
1. Model Kebijakan Bottom-Up Oleh Pemerintah Desa Patemon.....	90
2. Model Kebijakan Top-Down Oleh Pemerintah Desa Patemon.....	94
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Desa Patemon.....	98
1. Partisipasi Materialisme	98
2. Partisipasi Abstrak.....	102
BAB IV EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BIROKRASI MENURUT PANDANGAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE EDWARD III	107
A. Bentuk Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pembangunan Desa.....	108

1.	Pola Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pembangunan Desa	110
2.	Masyarakat Desa Memandang Pola Komunikasi Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa	111
3.	Pola Komunikasi Kepala Dusun Sebagai Bentuk Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Desa	114
4.	Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Komunikator Kebijakan Pembangunan Desa	116
B.	Struktur Birokrasi Desa Guna Menentukan Model Kebijakan Pembangunan Desa.....	118
1.	Peran Pemerintah Desa Dalam Menentukan Model Kebijakan Berdasarkan Struktur Birokrasi Desa	121
2.	Masyarakat Desa Melihat Struktur Birokrasi Sebagai Penentu Model Kebijakan Pembangunan Desa	123
3.	Model Kebijakan Pemerintah Desa Berdasarkan Peran Kepala Dusun Dalam Struktur Birokrasi Desa	126
4.	Tokoh Masyarakat Desa Melihat Struktur Birokrasi Sebagai Penentu Model Kebijakan Pembangunan Desa	129
C.	Disposition Aparat Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa.....	131
1.	Komitmen Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa	134
2.	Komitmen Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Bagi Masyarakat Desa	137
3.	Komitmen Kepala Dusun Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Oleh Pemerintah Desa	139
4.	Tokoh Masyarakat Melihat Komitmen Pemerintah Desa Sebagai Bentuk Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Desa	142
D.	Kualitas Sumber Daya Manusia Mendorong Tingkat Partisipasi Dalam Mengimplementasi Kebijakan Pembangunan Desa.....	144

1. Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Desa Guna Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa	146
2. Masyarakat Desa Sebagai Objek Peningkatan Kualitas Guna Meningkatkan Partisipasi Terhadap Kebijakan.....	148
3. Peran Kepala Dusun Terhadap Peningkatan SDM Dalam Partisipasi Masyarakat Kepada Kebijakan Pembangunan Desa	150
4. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Peningkatan SDM Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa	151
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN.....	164
A. INSTRUMEN WAWANCARA	164
B. DOKUMENTASI.....	167
C. CURRICULUM VITAE	171

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 SDGS Desa Patemon 2024.....	4
Gambar 1. 2 Model Street Level Bureaucracy.....	35
Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Informan Penelitian.....	70
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan kebutuhan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini sama dengan pengertian atau definisi desa yang termuat pada Undang-Undang nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Terdapat banyak elemen yang termuat di dalam desa diantaranya yakni, masyarakat desa dan pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas sebagai pelaksana birokrasi yang dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan desa guna meningkatkan kesejahteraan desa.

Pemerintah di tingkat desa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan menjadi perpanjangan tangan negara dalam implementasi kebijakan publik. Efektivitas kebijakan birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis masyarakat. Efektivitas kebijakan sendiri diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, pelaksanaan yang efisien, serta dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.² Dalam konteks desa, pendekatan partisipatif dan demokratis menjadi kunci keberhasilan

¹ Fanji Farman Muhammad Hasan, Farih Darmawan, Firmansyah, Sa'idah el adawiyah, Abdul Nadib, Harifudin, Andi Hartati, Ali Shodiqin, *Desa Dan BUMDes* (Jakarta, 2019).

² William N. Dunn, *Public Policy Analys*, ed. Pearson Education, 05 ed. (New York: Routledge, 2016).

birokrasi. Peranan masyarakat desa yang aktif dalam berpartisipasi menjadikan kehidupan di desa lebih demokratis. Kehidupan masyarakat yang demokratis merupakan salah satu karakter masyarakat madani (*civil society*) yang secara tidak langsung mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan desa. Teori masyarakat madani menekankan pentingnya adanya ruang publik di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan, termasuk melalui musyawarah desa, forum konsultasi publik, dan pengawasan sosial. Oleh karena itu, efektivitas birokrasi desa tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana partisipasi publik diakomodasi dalam proses kebijakan.³ Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang mempopulerkan konsep masyarakat madani, menyebutkan bahwa masyarakat madani adalah merupakan sistem sosial yang subur berasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, dan ketulusan atau transparansi sistem.⁴ Adanya inisiatif dari masyarakat secara tidak langsung membantu pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa. Namun, pada penerapannya tidak semua masyarakat desa memiliki daya usaha dan inisiatif yang tinggi. Hal ini didasarkan dengan bagaimana sistem sosial membentuk lingkungan masyarakat tersebut.

³ Larry Diamond, *Developing Democracy* (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999).

⁴ Muhammad Hasan, Farih Darmawan, Firmansyah, Sa'idah el adawiyah, Abdul Nadib, Harifudin, Andi Hartati, Ali Shodiqin, *Desa Dan BUMDes*.

Salah satu fenomena yang dikaji pada penelitian ini adalah efektivitas kebijakan di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Secara geografis, Desa Patemon merupakan suatu desa yang terletak disebelah timur Desa Bojongsari yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.854 jiwa per tahun 2025.⁵ Letak Desa Patemon terbilang strategis karena hanya berjarak 6 km dari pusat Kota Purbalingga. Dengan letak yang setrategis ini, masyarakat Desa Patemon sebagian besar berprofesi sebagai pedagang di kota dan juga berprofesi sebagai petani. Masyarakat Desa Patemon masih terbilang konservatif yang ditandai dengan pola kehidupan serta pola pikir yang masih tradisional. Berdasarkan aspek sosiologi yang peneliti simpulkan dari hasil observasi, bahwa masyarakat Desa Patemon masih terikat dengan nilai budaya yang kuat seperti sedekah bumi, sholat hujan, dan lani-lain. Karakter masyarakat desa yang masih konservatif ini secara tidak langsung mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah tingkat keberhasilan Pembangunan yang ada di Desa Patemon. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari berbagai macam aspek, salah satu aspek yang dapat dilihat yakni pada SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dalam SDGs terdapat banyak aspek seperti pembangunan, kemiskinan, pariwisata, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana desa berhasil menyelesaikan beberapa aspek yang ada.

⁵ “Desa Patemon, Kec. Bojongsari, Purbalingga,” 2024.

Menurut angka SDGs Desa Patemon tahun 2024 menyebutkan bahwa nilai dari 17 aspek yang ada di dalam SDGs sudah mulai membaik angka kenaikannya. Namun ada satu poin dibidang pembangunan yang terbilang masih sangat rendah. Minimnya pemahaman masyarakat akan kontur tanah yang tidak layak dibangun jalan aspal namun tetap bersiteghu pada pendapat tanpa melihat resiko di dalamnya.



Gambar 1. 1 SDGS Desa Patemon 2024

Berdasarkan data SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa Patemon, menunjukkan bahwa masih banyak poin yang harus segera tingkatkan lagi. Seperti contohnya yakni pada poin infrastruktur dan inovasi desa yang memiliki angka 8,26 dari 100. Angka tersebut terbilang sangat kecil dan tidak layak apabila dibandingkan dengan angka pada aspek lainnya. Angka yang kecil dalam SDGs Desa Patemon ini memiliki kaitannya dengan tingkat efektivitas pelaksanaan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes tahun 2019-2025. Dalam RPJMDes Desa Patemon tahun 2019-2025 membahas banyak poin rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah desa. RPJMDes Desa Patemon menjabarkan banyak poin sesuai dengan aspek yang ada di dalam desa. Salah satu poin yang dibahas dalam penelitian ini adalah sub poin pekerjaan umum dan penataan ruang.⁶ Berdasarkan sub poin ini menjelaskan program-program yang berfokus pada pembangunan dan rehabilitas pada desa yang diantaranya yakni pembangunan jalan, gang, makam, drainase, serta gedung-gedung yang ada di Desa Patemon. Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba meneliti terkait pembangunan desa pada dan bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Patemon dapat berjalan efektif serta efisien bagi seluruh elemen yang ada di Desa Patemon.⁷

Tercapainya kata efektif serta efisien pada sebuah pelaksanaan kebijakan yakni apabila dalam segi perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan RPJMDes serta mampu memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat desa. Namun, dalam beberapa studi kasus yang peneliti temui dalam observasi langsung ke lokasi penelitian yakni masih banyaknya ketidaktepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Patemon yang menjadikan hal tersebut sebuah pertanyaan terkait tingkat efektivitas di Desa Patemon.⁸ Sebagai contoh, adanya pembangunan jalan di dusun 4 Desa Patemon yang dinilai kurang *on point* untuk masyarakat malah menjadi prioritas pembangunan.

⁶ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Patemon Tahun 2019-2025 (Purbalingga, 2019).

⁷ “Desa Patemon, Kec. Bojongsari, Purbalingga.”

⁸ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Patemon Tahun 2019-2025.

Sebagaimana dalam kenyataannya bahwa jalan tersebut tidak terlalu masif dilalui dibanding jalan utama desa yang berada di dusun 6 yang masif dilalui dan menjadi jalan utama penghubung desa. Pembangunan yang dilakukan dari tahun 2018 hingga saat ini belum ada bentuk protes dari masyarakat desa terutama masyarakat terdampak. Tidak hanya satu contoh kasus, adapun contoh lain yakni pembangunan tempat wisata yang berada di Desa Patemon oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan beberapa investor dari luar. Pemerintah desa yang kurang komunikatif membangun tempat wisata tersebut dengan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar. Namun pada kenyataannya, warga tidak mendapatkan apa yang pemerintah desa janjikan mengenai lahan ekonomi seperti yang dimaksud. Dengan dua contoh tersebut sudah sangat menggambarkan minimnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang membuat beberapa pembangunan atau renovasi tidak mencapai target yang diinginkan. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan di desa patemon masih terbilang belum mencapai kata efektif bagi masyarakat desa.

Efektifitas kebijakan birokrasi di Desa Patemon perlu dianalisis menggunakan tiga aspek utama yakni: pencapaian hasil, efisiensi proses, dan tingkat partisipasi masyarakat. Hasil yang dicapai dalam penerapan kebijakan ini juga harus selaras dengan apa yang sudah dirancang dalam RPJMDes Desa Patemon yang sehingga dalam pelaksanaannya masih berpagu pada rencana pembangunan yang sudah direncanakan dari awal periode jabatan. Lalu makna efisiensi proses disini adalah bagaimana dalam

proses perencanaan hingga evaluasi sebuah kebijakan harus efisien dari segala sisi. Efisiensi anggaran pembangunan menjadi suatu hal yang perlu jelas disampaikan dan dimanfaatkan dalam sebuah penerapan kebijakan di desa. Hal ini dikarenakan anggaran harus dialirkan secara merata kepada program lain agar mampu terlaksana dengan maksimal. Yang terakhir yakni partisipasi masyarakat Desa Patemon terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Keterbatasan akan struktur sosial membuat masyarakat Desa Patemon kurang berani dalam menyampaikan aspirasi akan kegelisahan yang terjadi di sekitar. Elemen yang diandalkan dalam pengambilan aspirasi yang masih menggunakan unsur kepala dusun setempat membuat kedekatan emosional antara pemerintah desa dengan masyarakat desa kurang maksimal. Pentingnya suara dari masyarakat guna memaksimalkan dampak atas adanya kebijakan di Desa Patemon. Peter M. Blau menjelaskan dalam teori *Parameters of Social Structure* (1974), bahwa minimnya komunikasi antar struktur social didasari oleh dua jenis diferensiiasi antara lain adalah *Nominal* dan *Graduate*. *Nominal* merujuk pada heterogenitas antar subkelompok sedangkan *Graduate* merujuk pada hierarki status yang melekat pada diri individu.⁹

Dengan melihat pola pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Desa Patemon dalam beberapa poin yang masih kurang tepat, sehingga peneliti terdorong untuk meneliti terkait topik penelitian ini. Apakah pemerintah

⁹ Benjamin Rohr and John Levi Martin, “American Sociological Review,” *A Jurnal of The American Sociological Association* 90 (2025).

desa sudah optimal dalam melaksanakan kebijakan desa serta implementasi kebijakan desa? Atau ada kendala tertentu yang membuat ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan birokrasi. Dengan melihat salah satu tugas pemerintah desa sebagai birokrasi di tingkat desa. Yang dimana pemerintahan desa harus melayani dengan baik apa yang menjadi urgensi bagi masyarakat desa. Maka dari itu, pemerintah desa harus mampu menyerap aspirasi dari masyarakat desa dengan cara melakukan sinergitas antara keduanya guna pelaksanaan kebijakan yang efektif oleh birokrasi pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dari itu peneliti memiliki sebuah rumusan masalah yakni:

Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan birokrasi di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui model kebijakan desa oleh Pemerintah Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
3. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan desa di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti membagi manfaatnya menjadi 2 yakni manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sosiologi politik maupun sosiologi pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kritik maupun saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Terkhusus bagi pemerintahan desa yang dimana bersinggungan langsung dengan masyarakat yang sifatnya masih konservatif

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat terkait pentingnya kolaborasi untuk mencapai sinergitas antara pemerintahan formal dengan pemerintahan informal.

c. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama yakni bidang pemerintahan desa maupun masyarakat desa.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kutipan dari beberapa literatur yang terdiri dari jurnal, skripsi, maupun tulisan lain

sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian sebelumnya dipilih berdasarkan kebutuhan referensi dan panduan untuk penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti ini juga digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diambil sebagai bahan rujukan, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti. Penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya kepala desa atau dalam tanda kutip sebagai pemerintahan formal, bekerja sama secara langsung dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Kerja sama yang dilakukan pemerintahan Desa Sumberpasir dengan LPMD ini menghasilkan sebuah kebijakan. Pemerintah desa juga berperan sebagai pembina yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang biasa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah pembinaan. Dengan dapat dilakukannya tugas-tugas dari pemerintahan Desa Sumberpasir dengan baik, Desa Sumberpasir mampu membuktikan

dengan meraih pencapaian yakni berhasil masuk ke seleksi desa mandiri tahun 2011.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menyinggung terkait pemerintahan formal dengan berbagai macam tugas-tugasnya. Dengan menggunakan relasi kuasa dalam menjalankan tugas membuat pemerintahan formal bebas dalam membuat program kerja yang dimana program kerja ini merupakan implementasi dari *goals* sebuah pemerintahan. Lalu perbedaanya adalah, dalam penelitian ini lebih menitik-fokuskan kepada keberhasilan program kerja yang membawa sebuah prestasi bagi desa. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti selain berfokus pada program kerja saja, tetapi juga terkait sinergitas antara pemerintahan formal dengan pemerintahan informal.

Kedua, Penelitian dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Hukum Universitas Iqra buru, Maluku dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” yang ditulis oleh Sofian Malik. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebagai pemimpin sebuah desa, pemerintahan desa wajib menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab untuk masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintahan desa merupakan amanah dari para masyarakat, sehingga aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya dapat terserap dengan baik melalui program yang nyata guna kepentingan masyarakat. Upaya

¹⁰ Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, and Lely Indah Mindarti, “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 5 (2019): 890–99.

mengembangkan kehidupan masyarakat menjadi penting karena melihat kondisi masyarakat desa yang konservatif. Sedangkan, disisi lain partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kerja sangat dibutuhkan agar dapat terlaksana secara maksimal.¹¹

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama menyinggung terkait kepemimpinan pemerintah desa yang memiliki wewenang dalam mengatur desa. Lalu juga memiliki kesamaan mengenai objeknya yakni masyarakat desa yang bersifat masih konservatif. Sedangkan perbedaanya adalah terkait upaya mencapai sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, Upaya yang dilakukan adalah dengan menarik atau mengambil aspirasi dari masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti, upaya untuk mencapai sinergitas adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Entah itu dalam bentuk program kerja ataupun dalam bentuk kebijakan.

Ketiga, Penelitian dalam *Jurnal artikel, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga* yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri” yang ditulis oleh Hendi Sandi Putra, 071311333041. Pada artikel jurnal tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan dari sebuah pelaksanaan program kerja pemerintahan adalah

¹¹ Sofian Malik, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2020): 325–43.

memiliki *impact* yang langsung terlihat oleh masyarakat. Dalam jurnal artikel ini, tata kelola ruang yang berhasil menjadi sebuah acuan keberhasilan pemerintah desa. Pemerintah desa juga melakukan transparansi kepada masyarakat desa guna mendapat kepercayaan masyarakat desa. Pemerintah desa juga rutin memberikan informasi terkait dana desa dengan melalui rapat bersama tokoh masyarakat setempat. Rapat tersebut berisikan tentang apa yang menjadi program prioritas desa untuk satu tahun kedepannya.¹²

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama memiliki objek yang sama yakni masyarakat desa. Masyarakat desa mendapatkan *impact* dari apa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui penerapan program kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada tata kelola ruang yang menjadikan tata kelola ruang pada desa mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana pola kerja pemerintahan dapat berimpact ke masyarakat bukan hanya dari segi tata kelola ruangnya saja. Dengan mengedepankan sinergitas antara masyarakat desa dan pemerintahan desa.

Keempat, Penelitian dalam *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan

¹² Handi Sandi Putra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Goverence Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri,” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, 2020.

Desa di Desa Pematang Johar” yang ditulis oleh Siti Hajar, Khaidir Ali, dan Agung Saputra. Pada Jurnal ini membahas tentang tugas pemerintahan desa yang harus memiliki jiwa yang demokratis dan menumbuhkan kehidupan demokratik pada masyarakat desa guna memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan penuh keadilan. Pemerintahan desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hierarki yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa juga berperan penting dalam melaksanakan program kerja dan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Salah satu contoh bentuk pelayanan yang dilakukan pemerintah desa adalah membuat pelayanan administrasi e-desa yang dirancang melalui aplikasi handphone yang dapat diakses oleh semua masyarakat desa. Meski memiliki kendala terkait masyarakat desa yang gagap akan teknologi membuat program ini sulit direalisasikan secara makssimal oleh pemerintahan desa.¹³

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang pelayanan atau pelaksanaan publik oleh pemerintahan desa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini menggunakan teknologi dalam pengumpulan aspirasi dan juga upaya sinkronisasi antara pemerintahan dengan masyarakat desa. Penelitian yang diteliti oleh peneliti mengedepankan kolektif kolegial dalam penyatuan tujuan antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Sehingga

¹³ Siti Hajar, Khaidir Ali, and Agung Saputra, “Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar,” *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6 (2022): 136–42.

menumbuhkan sebuah sinergitas yang berdampak positif bagi keberlangsungan program kerja desa.

Kelima, Penelitian dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal yang berjudul “Model Kelembagaan Pemerintahan Desa” yang ditulis oleh Arif Zainudin. Pada jurnal ini membahas tentang struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana desa tidak harus merujuk pada urusan urusan yang dimilikinya, namun kepala desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam penelitian ini juga membahas terkait Desa Swadaya menurut model kelembagaan Pemendagri No.84 Tahun 2015. Desa Swadaya merupakan desa yang masih tradisional dan masih cenderung memiliki rasa toleransi yang tinggi antar masyarakatnya. Hal ini membuat kehidupan masyarakat desa masih ditentukan oleh adat istiadat yang ada dan dilaksanakan secara turun temurun. Sedangkan tugas kepala desa yang dibantu seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugas harus mampu menjalankan fungsi unit organisasi dan kewarganegaraan. Unit-unit organisasi tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait struktur pemerintahan desa serta

¹⁴ Nia Agustina, Esa Esa, and Mohamad Yusuf, “Model Kelembagaan Pemerintah Desa,” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 201–9, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>.

membahas pula terkait masyarakat desa yang konservatif. Dengan masyarakat desa yang masih konservatif ini membuat tugas pemerintahan desa menjadi sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa sebagai kelembagaan yang formal harus mampu memberi kesejahteraan kepada masyarakat desa dalam bentuk implementasi program kerja. Selain dari segi latar tempat yang berbeda, perbedaan yang lain antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ialah hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Dalam penelitian ini tidak disebutkan dengan rinci dan jelas terkait upaya sinergitas antara pemerintahan desa dengan masuyarakat desa. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti, pemerintah desa mengupayakan adanya sinergitas yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Dengan adanya sinergitas antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa, membuat semakin optimal dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Keenam, Penelitian dalam *Jurnal Politik Profetik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang ditulis oleh Sakinah Nadir. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki tujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Penekanan

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berada pada daerah kabupaten dan kota, lalu menciptakan anggapan bahwa pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai langkah dengan melihat kondisi objektif daerah serta disesuaikan dengan tuntutan dari dinamika masyarakat daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, membuat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah lebih efektif dalam penerapannya.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama meneiti terkait adanya efektivitas serta efesiensi yang dilakukan pemerintahan desa dalam pelaksanaan program kerja desa. Adanya dinamika yang masif antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang membuat penerapan program kerja ini menjadi efektif dan efisien. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Dalam penelitian ini, pemerintahan desa melakukan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk otonomi daerah. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, itu tidak hanya dalam bentuk otonomi daerah saja. Namun, ada campur tangan dari masyarakat desa yang membuat munculnya sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Ketujuh, Penelitian dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Nasional yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan

¹⁵ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013,” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2020): 2013, <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.

Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Hasnop Putra Minang, Kumba Digidwiseiso, Eko Sugiyanto. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur rumah tangganya, yang menyangkut pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Melihat masyarakat di Indonesia mayoritas tinggal di pedesaan. Hal ini membuat desa menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Memberdayakan masyarakat desa berarti mendukung keefektifan pembangunan nasional guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa.¹⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan apa peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait pemerintahan desa yang menjadi penyelenggara pelayanan publik di desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada upaya pemberdayaan yang lebih masif pada penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, pemberdayaan masyarakat tidak terlalu masif dibahas. Hal ini dikarenakan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih membahas terkait upaya tumbuhnya sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dengan adanya sinergitas

¹⁶ Eko Sugiyanto Hasnop Putra Minang, Kumba Digidwiseiso, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Di Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya Unas* 42 (2021): 6.

ini, membuat pemerintah desa lebih optimal dalam melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Kedelapan, Penelitian dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDES” yang ditulis oleh Yulianus Nardin. Dalam Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai penyelenggara otonomi desa bermaksud sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu yang ditentukan, serta dalam rangka menjamin keberlanjutan Pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, pengawasan, dan penyelenggaraan. Sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang terjamin bagi masyarakat desa dan mampu memberikan kemajuan bagi masyarakat. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi segala kebutuhannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan pengembangan sumber daya manusia di desa menjadi suatu hal yang penting. Hal ini disebabkan masyarakat desa juga memiliki pemahaman yang lebih terkait teritorialnya dan mampu memberikan

gambaran bagi pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan dan guna untuk menjalin keefektivan dalam penyelenggaraannya.¹⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait upaya memberi kesejahteraan bagi masyarakat desa. Mengingat pemerintah desa merupakan pelaksana otonomi desa yang berada pada level pedesaan. Dengan berfokus pada pengembangan masyarakat melalui pembangunan, pelatihan, maupun pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengedepankan pembahasan terkait efektivitas pembangunan sebagai upaya memberi kesejahteraan bagi masyarakat desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, pemerintahan desa mencoba melakukan sinergitas terlebih dahulu guna meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik. Sehingga mampu memberikan kesejahteraan serta untuk pengembangan masyarakat desa.

Kesembilan, Penelitian dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu” yang ditulis oleh Fathur Rizky Pramudya, Prilla Marsingga, Hanny Purnamasari. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pemeritah selaku perancang penyelenggaraan dan

¹⁷ Yulianus Nardin, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): 140–45, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>.

pembayaran utama dari pembangunan, membutuhkan partisipasi masyarakat guna memaksimalkan pembangunan. Karena pada dasarnya, Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi suatu hal yang diperlukan. Karena masyarakat mampu memberikan kepercayaan kepada pemerintah secara lebih apabila ada transparansi maupun keterlibatan dari segi pelaksanaan Pembangunan maupun implementasi program kerja. Namun, pemerintah juga harus memiliki ketegasan, ketanggapan, dan cepat untuk mampu melakukan prioritas pembangunan yang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang berada dibawah pemerintahannya.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan desa. Pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa guna mengefektifkan pembangunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa tidak serta merta untuk pengguguran tanggung jawab saja. Namun juga untuk mendorong masyarakat desa dalam keikutsertaan membangun desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus yang dikaji. Pada penelitian ini, cenderung berfokus pada pengelolaan dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam

¹⁸ Fathur Rizky Pramudy, Prilla Marsingga, and Hanny Purnamasari, “Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2129–33, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3602>.

penelitian yang peneliti teliti, titik fokus berada pada pola interaksi pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Kesepuluh, Penelitian dalam *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam (JUTAPI)* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Berni yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa” yang ditulis oleh Sepiyah, Hardiyatullah, Hamroni, Nurman Jayadi. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan kebijakan publik, partisipasi masyarakat menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sebuah proses keterlibatan secara aktif bagi masyarakat terutama masyarakat lokal. Keterlibatan aktif dalam pengambilan peran maupun keputusan tentang kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan publik memiliki beberapa manfaat yang signifikan, diantaranya adalah meningkatkan legitimasi, relevansi kebijakan yang lebih baik, peningkatan kualitas kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya manfaat yang signifikan ini seharusnya mampu membuat pemerintah semakin terbuka dalam melibatkan masyarakat. Guna mencapai pembangunan yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat yang berada dibawah pemerintahannya.¹⁹

¹⁹ Sepiyah Sepyah et al., “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa,” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>.

Persamaan pada penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait peran penting masyarakat desa dalam penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pelaksana pelayanan publik ditingkat desa harus mampu melaksanakan pelayanan yang baik dan tepat sasaran. Maka dari itu, peran masyarakat desa menjadi penting dalam keikutsertaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan perbedaannya selain dari latar tempat dan juga dari pola pemerintahan desanya. Pola masyarakat desa yang ikut serta dalam mengambil peran pada pembentukan kebijakan. Dalam penelitian ini, pembentukan kebijakan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh masyarakat desa dilakukan dengan aktif oleh masyarakat desa. Inisiatif yang baik dilakukan oleh masyarakat desa dalam membantu penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, masyarakat desa masih harus dipantik oleh pemerintah desa dalam meningkatkan keaktifan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga, perlu adanya *effort* lebih dari pemerintahan desa yang seminimal mungkin mampu memberikan pengertian bahwa pentingnya berperan aktif dalam pembentukan kebijakan.

Kesebelas, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan daan Ilmu Komunikasi*, Prodi Ilmu Pemeritaha, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo

Utara” yang ditulis oleh Riyanti Samaun, Bala Bakri, Achmad Risa Mediansyah. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan upaya dan usaha pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan desa. Dengan adanya pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat desa, membuat rasa kepedulian masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat desa harus terlibat dalam pembangunan desa guna meningkatkan kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Pembangunan yang berhasil dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan, selain pemerintah harus melakukan perencanaan dengan baik, urgensi atau prioritas dalam sebuah pembangunan menjadi hal yang penting dikarenakan pembangunan yang dilakukan akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat.²⁰

Persamaan antara penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait keikutsertaan masyarakat desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena, keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu alasan terlaksanakannya kebijakan desa yang efektif. Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini lebih mengedepankan manfaat dari kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yakni dari segi pembangunan. Sedangkan apa yang

²⁰ Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara,” *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 18–33, <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>.

peneliti teliti mengedepankan manfaat dari kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa dari segi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga muncul sinergitas dan mampu memberikan keefektifan dalam penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Keduabelas, dalam *Jurnal Agregasi (Akasi Reformasi Goferment dalam Demokrasi)* yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)” yang ditulis oleh Ade Kadarisman dan Ilham Gemiharto. Dalam Jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem bermasyarakat terutama bagi masyarakat desa dan pemerintahan desa, segala hukum dan kebijakannya berlaku. Baik itu formal maupun informal, baik itu tradisional ataupun sesuai dengan pemerintahan pusat. Dalam jurnal ini membahas terkait pemimpin desa harus mampu memberikan gambaran kepada masyarakat desa dalam bentuk visi maupun misi. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu mengikuti perspektif masyarakat desa guna mencapai *goals* dan melakukan implementasi dari visi-misi dengan efektif dan efisien. Hukum tua pemerintahan desa Warembung memiliki visi yang dijadikan sebagai acuan bersama dalam pembangunan desa dari sektor manapun. Visi yang disampaikan juga tidak hanya untuk diri sendiri melainkan untuk kebaikan bersama. Maka dari itu, pemerintah desa sebagai pemerintahan formal harus mampu memberikan

kebijakan yang mampu diterapkan bersama sehingga visi misi ini dapat dilaksanakan secara maksimal.²¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait bagaimana sinergitas itu muncul antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Dengan pemerintah desa yang mempu memberikan gambaran terkait bagaimana cara membangun desa dengan dilihat dari visi dan misinya. Dalam penelitian yang peneliti teliti, pemerintah desa juga melakukan upaya sinergitas guna memaksimalkan tugasnya sebagai pemerintahan formal yang ada di desa. Lalu perbedaannya terletak dari hasil adanya sinergitas antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yakni dapat dilihat dari visi dan juga misinya. Dalam penelitian yang peneliti teliti, bahwa pemerintahan desa langsung turun dalam melakukan upaya terwujudnya sinergitas yang berguna bagi pembangunan desa. Dengan adanya upaya sinergitas yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwasanya membangun desa bukan kewajiban dari pemerintah desa saja, namun juga menjadi kewajiban bersama seluruh elemen yang ada di desa.

Ketigabelas, dalam *Jurnal Administrasi Publik, Ilmu Administrasi* Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Peran Street Level Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

²¹ Welly Waworundeng et al., “Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.221>.

Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar” yang ditulis oleh Muhlis Madani, Muhammad Irwan Nur Iva, dan Iswandi Amiruddin. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam dinamika *street level bureaucracy* apabila tidak dapat dikendalikan oleh elemen yang terlibat maka akan menimbulkan sebuah konflik di dalamnya. Disisi lain, peran *street level bureaucracy* juga memiliki peran penting dalam mengatur tingkat konflik yang sifatnya kontemporer sesuai dengan peranan mereka sebagai pengontrol sosial. Sebagai warga negara juga berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pelaku pemerintahan di sebuah wilayah. Jika dilihat dari sudut pandang warga negara, peran *street level bureaucrat* secara luas merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang bersifat insentif. Sebagai rutinitas sehari-hari secara tidak langsung berdekatan berinteraksi dengan tema yang berbeda-beda seperti pelayanan parker berlanggan, pendidikan, dan layanan *public service* lainnya. Sebagai birokrat garis depan dapat memperlakukan warga sesuai dengan harapan atau ekseptasi masyarakat warga sekitar dengan baik seperti perlakuan yang adil efektif.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas sebuah isu dengan menggunakan *street level bureaucracy* sebagai cara pandangnya. Street level bureaucrat memang menjadi dasar pemikiran dalam sebuah isu yang akan diteliti oleh peneliti yang dimana pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus didapat oleh

²² Ahmad Syawal, Muhlis Madani, and Nuryanti Mustari, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar,” *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 3, no. 2 (2021): 93–107, <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.5941>.

setiap warga negara. Sedangkan perbedaannya adalah dari objek dan titik fokus yang diteliti. Dalam penelitian ini membahas terkait street level bureaucrat dalam meningkatkan efektivitas disektor pangan dan pertanian. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu memberikan kebijakan yang berimbang pada peningkatan sektor pertanian pangan di Makassar. Sedangkan apa yang peneliti teliti yakni menggunakan street level bureaucrat sebagai cara pandang dalam pelaksanaan kebijakan desa yang berguna untuk membangun sinergitas antara pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan ditingkat desa dengan masyarakat desa.

Keempatbelas, Penelitian pada *Jurnal Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berjudul “Pemerintahan Desa: Dilema *Street Level Bureaucracy* dan Otonomi Desa” yang ditulis oleh Rudi Rohi. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaran pemerintahan desa mengalami dilema yang serius ketika dihadapkan dengan pilihan mewujudkan otonomi desa atau melaksanakan perencanaan yang sudah disiapkan oleh pemerintahan diatasnya yang membuat pemerintahan desa tidak efektif dan efisien. Persoalan yang muncul kerap kali dari ketiadaannya sinergitas antara pemerintahan desa yang memiliki wewenang lebih tinggi daripada

masyarakat desa. Sehingga muncul persoalan-persoalan yang mengarah pada ketidak selaras dalam melaksanakan kebijakan desa.²³

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait pemerintahan desa yang menggunakan cara pandang *street level bureaucracy* dalam pelaksanaan kebijakan desa. Sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian ini membahas terkait dilema yang terjadi apabila pemerintah desa tidak maksimal dalam pelaksanaan kebijakan desa maupun program kerjanya. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmaksimalan pemerintahan desa dalam penerapan street level bureaucrat yang membuat timbulnya konflik di dalamnya. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti mengarah pada upaya sinergitas guna memaksimalkan pelayanan publik sehingga selain untuk mencapai efektivitas dan efisiensi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik didalamnya

Kelimabelas, Pada *Jurnal Hukum, Politik dan Islam (JHPI)* Sekolah Tinggi Dharmawacana Metro yang berjudul “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Desa” yang ditulis oleh Dwi Wijayanto. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian program kerja dibutuhkan seluruh elemen desa tanpa terkecuali yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa menjadi aktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan maupun program kerja desa. Dalam setiap

²³ Rudi Rohi, “Pemerintahan Desa ‘Dilema Street Level Bureaucracy Dan Otonomi Desa,’” *Jurnal Civicus*, 2010.

pelaksanaan program yang ada di desa, Kepala Desa hampir selalu mempunyai peranan yang sama, yaitu sebagai pemimpin, koordinator, komunikator, pengawas, dan penanggungjawab dalam setiap pelaksanaan program-program tersebut. Meski harus tetap melibatkan seluruh elemen yang ada di desa, pelaksanaan program kerja desa harus tetap berjalan sesuai dengan arahan kepala desa. Maka dari itu, menjadi kepala desa harus mampu melaksanakan prinsip *Street Level Bureaucracy* yang baik guna mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.²⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas terkait bagaimana cara agar implementasi program kerja desa dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada aktor atau peranan kepala desa saja, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti teliti lebih berfokus pada upaya sinergitas guna memaksimalkan pelaksanaan kebijakan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Setelah melihat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti dan melihat perbedaan serta persamaannya, membuat peneliti terdorong untuk meneliti topik tersebut. Adapun alasan pemilihan topik “Studi Efektivitas Kebojakan Birokrasi di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga” dalam skripsi ini yakni aspek gap penelitian

²⁴ D Wijayanto, “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Desa,” *Diktum: Jurnal Hukum, Politik Dan ...*, 2024, <https://ejournal.mediapenamandiri.com/index.php/jhpi/article/view/67%0Ahttps://ejournal.mediapenamandiri.com/index.php/jhpi/article/download/67/26>.

terdahulu (*research gap*). Pada penelitian sebelumnya dari *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Nasional yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.” Dalam Jurnal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hanya sebagai objek dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitupun dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan daan Ilmu Komunikasi*, Prodi Ilmu Pemeritaha, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara” yang dimana dalam jurnal tersebut membahas bahwa masyarakat desa tidak hanya sebagai objek dari program kerja ataupun kebijakan pemerintah. Namun, juga sebagai partisipator dalam perencana segala kebijakan yang akan dilaksanakan oleh segenap elemen yang ada di desa.

F. Landasan Teori

1. Definisi Konseptual

a. Pemerintahan Desa

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafie,2003:135), Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.²⁶ Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga satu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan dengan normal dan wajar. Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan terstruktur fungsional, maupun tugas kewenangan.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kewenangan masyarakat desa tersebut terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Sehingga selaku kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan organisasi atau kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

²⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014,” 2014,
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

²⁶ D Wijayanti, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,” 2018, 13–48, <https://repository.uin-suska.ac.id/13785/>.

b. Masyarakat Desa

Menurut Karl Marx, definisi desa ialah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan dikarenakan terdapat pertentangan antara beberapa kelompok kemudian terpecah secara ekonomi.²⁷ Masyarakat dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Society* yang berasal dari Bahasa latin *socius*, yang berarti “kawan”. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau biasa disebut berinteraksi. J.L. Gillin dan J.P. Gillin merumuskan dalam bukunya *Cultural Sociology* bahwa masyarakat adalah unsur kesatuan hidup, unsur adat istiadat dan kontiunitas juga identitas bersama.²⁸ Kehidupan masyarakat desa cenderung menerapkan interaksi yang lebih maksimal ketimbang masyarakat kota. Hal ini disebabkan karena kehidupan yang homogen serta didukung dengan letak geografis pemukiman serta tujuan kehidupan yang sama.²⁹

Masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota dikarenakan cara pandang, gaya hidup, dan kelembagaan masyarakatnya. Masyarakat desa yang cenderung konservatif masih sangat bepegang teguh dengan nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada sedari lama. Sedangkan masyarakat kota cenderung lebih modern dari segi pola hidup dan cara berfikir. Dengan adanya perbedaan yang terlihat antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, membuat pola

²⁷ Edward Aveling et al., “A Critique of Political Economy” I, no. 2008 (2015).

²⁸ J.L. Gillin and J.P. Gillin, *Cultural Sociology* (Macmillan, n.d.).

²⁹ KHANZA JASMINE, “Masyarakat Desa Dan Pola Hidup Interaktif,” *Pedesaan Dan Kehidupan Interaktif Masyarakat Desa Dalam Pola Bermasyarakat*, 2014, 1–11.

hidup masyarakat desa jauh lebih tidak individualis ketimbang masyarakat kota. Dalam pandangan Emile Durkheim bahwa masyarakat desa memiliki kecenderungan solideritas mekanik sedangkan masyarakat kota memiliki sifat solideritas organik. Dimana masyarakat desa lebih hidup mengelompok dan kolektif dengan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan masyarakat kota lebih memilih individualis dengan melaksanakan kehidupan sesuai dengan tujuan masing-masing.³⁰

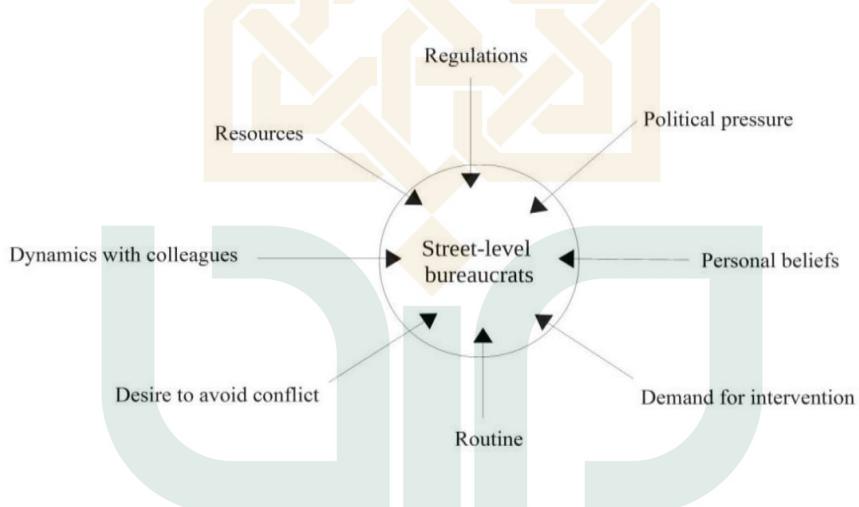
c. Street Level Bureaucracy

Street Level Bureaucracy atau birokrasi tingkat jalanan yang dimana bertugas untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. *Street Level Bureaucracy* merupakan apparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik. *Street Level Bureaucrat* merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan, *Street Level Bureaucracy* adalah suatu pola terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Michael Lipsky, kebijakan pemerintah yang sebenarnya adalah kebijakan yang bergantung pada mereka yang bekerja langsung kepada masyarakat. Lipsky mengidentifikasi masalah-masalah yang melekat pada Sebagian besar lembaga birokrasi tingkat akar, seperti keterbatasan sumber daya,

³⁰ Angkasawati, "Masyarakat Desa," *Publiciana* 8 (2015): 1–23.

anggaran, dan kurangnya kerja sama antar elemen yang menjadi objek dari kebijakan.³¹

Istilah birokrasi garis depan merujuk pada aparatur birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dengan makna lain yakni adalah aparatur birokrasi yang melakukan akses langsung dengan masyarakat. Konsep ini diperkenalkan oleh Wetherley pada tahun 1977 yang berpendapat bahwa street level bureaucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan hubungan langsung dengan masyarakat.³²



Gambar 1. 2 Model Street Level Bureaucracy

Sumber: Media Online

Berdasarkan model di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut; Pertama, **Regulasi** (*Regulations*) atau kebijakan adalah bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah melalui peraturan

³¹ J. Hutchinson, *Street Level Bureaucracy* (EBSCO Research Starters, 2025).

³² Muhlis Madani, Muhammad Irvan Nur Iva, and Iswadi Amiruddin, "Peran Street Level Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar," *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 3 (2021): 333–43, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.

tertulis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika street level bureaucrats dapat melakukan tugas mereka dengan benar dan tepat sehingga dapat mewakili regulasi maka akan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang mendapatkan regulasi tersebut. Kedua, **Tekanan** politik atau juga dikenal sebagai *Political Pressuer* dapat memberikan pengaruh kepada street level bureaucrats dalam mengerjakan tugas dan perananya sebagai birokrasi yang memiliki kedudukan. Tekanan politik yang ada pada street level bureaucrats bisa berasal dari sedikitnya kualitas dan ketidakseimbangan antara beban kerja yang diperoleh pada jumlah sumber daya manusia. Ketiga, **keyakinan** atau perspektif pribadi (*Personal Belief*) yaitu keyakinan yang dimiliki oleh street level bureaucrats ketika memberikan *public service* yang dapat memberikan dampak pada siklus kinerja dari pegawai serta mendapatkan *feedback* dari masyarakat yang dilayani oleh street level bureaucrats. Keempat, **Intevensi** (*Demand for Intervention*) pada street level bureaucrats adalah strategi yang dimana dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melayani dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat. Kelima, **Rutinitas** (*Routine*) adalah ketika street level bureaucrats mempunyai kebiasaan untuk memberikan *public service* ke masyarakat yang melakukan permohonan. Keenam, **Keinginan** untuk Menghindari Konflik (*Desire to Avoid Conflict*) konflik yang sering muncul

adalah karena kompleksitas pada tahapan yang dilakukan melalui pelayanan publik oleh street level bureaucrats sering kali menimbulkan sebuah konflik. Dengan demikian, adanya cara ini, street level bureaucrats dapat menerapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Ketuju, **Dinamis dengan Rekan Kerja** (*Dynamic with Colleagues*) street level bureaucrats cenderung menghambat keputusan politik yang diambil oleh organisasi birokrasi dibandingkan memberikan respon yang tepat ketika memberikan bantuan publik kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan keahlian profesional birokrat tingkat jalanan dalam birokrasi street level bureaucrats. Misalnya, ada organisasi yang tidak berhasil dalam upaya memberikan *public service* yang baik karena memiliki tekanan dari politik yang dilakukan oleh para birokrat di tingkat jalanan untuk mempolitisasi permasalahan sehingga tidak mungkin memberikan pelayanan publik yang optimal. Lalu yang terakhir yakni **Sumber** (*Resource*) seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat umum, maka semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan sehari-hari.

Birokrasi pemerintah meruapakan suatu organisasi atau lembaga yang memiliki struktur dan prosedur dalam mencapai tujuannya. Konsep perilaku birokrasi dalam pandangan Thoha selaku pengamat politik desa yakni perilaku birokrasi dapat dipakai bersama dengan konsep perilaku organisasi karena dasarnya

birokrasi maupun organisasi adalah suatu sistem yang ditopang oleh manusia yang berusaha mencapai tujuan dan selalu berperilaku. Perilaku birokrasi tercermin dari perilaku manusia (birokrat), dimana seperangkat perbuatan individu kemudian berubah menjadi perilaku kelompok. Birokrasi menjadi sebuah peran penting apabila memiliki visi yang selaras antara masyarakat dengan pemerintahnya yang berguna menjalankan sebuah keefektifan dalam menjalankan kebijakan dalam bentuk apapun.³³

2. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan bisa dideskripsikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta atau individu.³⁴ Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubung dengan adanya kendala-kendala tertentu sembari mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan target yang diinginkan.³⁵

³³ Iswahyudi, “Perilaku Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) Dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Governance and Politics (JGP)* 2, no. 1 (2022): 1–9, <https://ejournal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/222>.

³⁴ “Pengertian Kebijakan,” 2017, <https://id.wiktionary.org/wiki/kebijakan>.

³⁵ Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H Pasomah, and Very Y Londa, “Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Administrasi Publik IX*, no. 3 (2023): 339–50.

Implementasi merupakan sebuah proses bagaimana mentransformasikan input ke dalam sebuah bentuk kegiatan atau tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan.³⁶ Dalam bentuk penerapannya bahwa implementasi selalu beriringan dengan rancangan yang telah dirancang bersama guna mencapai tujuan. Hasil yang baik dari sebuah program kerja tergantung sejauh mana dan semaksimal mana pemerintah mampu melaksanakan implementasinya dalam sebuah program kerja maupun kebijakan. Studi Implementasi Kebijakan adalah hal yang penting bagi sebuah kebijakan publik. Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan dan segala konsekuensinya bagi masyarakat. Implementasi bagi sebuah kebijakan melibatkan pemerintah dan juga masyarakat guna mendorong dan memaksimalkan kebijakan itu sendiri yang nantinya untuk keefektifan dari sebuah program maupun kebijakannya. Adapun empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur birokrasi.³⁷

Komunikasi, dalam sebuah implementasi kebijakan perlu yang namanya komunikasi yang efektif serta efisien oleh para penanggung jawab kebijakan. Hal ini dikarenakan para penanggung jawab harus mampu mengetahui apa yang dirancang dan apa yang akan dilakukan

³⁶ Guntur Setiawan, “Peran Implementasi Pembelajaran Dalam Meingkatkan Semangat Belajar,” 2016, 1–23.

³⁷ Tiwa, Pasomah, and Londa, “Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.”

kedepannya. Dalam melakukan apa yang akan dilakukan juga harus menimbang apa yang diinginkan oleh masyarakat dan menjadi sebuah hal yang bersifat *urgent* bagi masyarakat. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat, dan konsisten. Dengan masifnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi, mampu meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat serta mampu meningkatkan upaya sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah menjadi jalan untuk mempermudah pembuatan kebijakan. Dimana dalam membuat kebijakan ada beberapa faktor antara lain adalah formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.³⁸ Dengan adanya langkah-langkah tersebut, adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat desa membuat kebijakan dapat dijalankan dengan efektif serta efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir adanya konflik internal di dalamnya.³⁹

Sumber daya dalam kajian teori George Edward III ini merupakan sebuah faktor pendorong dari sebuah implementasi. Bisa dalam berntuk aktor maupun diluar dari aktor tersebut namun tetap memiliki peran yang penting dalam sebuah pengimplementasian kebijakan. Dalam

³⁸ Mulyono, “Model Implementasi Kebijakan George Edward III,” Magister Administrasi Publik, 2009.

³⁹ R. Nainggolan, “Implementasi Kebijakan Dan Faktor Keberhasilannya,” *Jurnal Universitas Medan Area*, 2017, 19–49.

penelitian ini, sumber daya yang dimaksud yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi aktor berhasil atau tidaknya kebijakan yang diimplementasikan. Apabila dilihat dari bagian formal yakni pemerintahan desa, sumber daya yang dimaksud adalah kepala desa beserta jajaran stafnya. Namun apabila dilihat dari bagian informal yakni masyarakat, terkhusus bagi mereka yang memiliki peran penting bagi lingkungan sosialnya. Namun, pada sisi lain kualitas sumber daya manusia (SDM) masih dibilang kurang yang sehingga secara tidak langsung menjadi sebuah hambatan bagi sebuah pelaksanaan program kerja desa atau implementasi kebijakannya.⁴⁰

Struktur Birokrasi menjadi hal yang penting dalam terlaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Wewenang, hak, dan kewajiban tidak boleh tumpang tindih antar jabatan. Sehingga, pelaksanaan program kerja maupun pengimplementasian kebijakan desa dapat berjalan efektif. Sistem birokrasi yang baik juga mendukung terjadinya koordinasi yang baik antar elemen yang ada di desa. Ini yang menjadikan George Edward III menaruh struktur birokrasi sebagai salah satu faktor dalam implementasi kebijakan.

Disposition, merupakan salah satu faktor pendorong implementasi kebijakan menurut George Edward III. Disposition merupakan penekanan

⁴⁰ Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015): 116–25, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>.

terhadap implementor kebijakan.⁴¹ Para implementor harus memiliki komitmen yang tinggi serta amanah dalam melakukan kinerja. Dalam kasusnya, pemerintah desa sebagai implementor kebijakan maupun program kerja harus bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh elemen yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan bersama secara efektif. Hal ini juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat desa dalam membantu memaksimalkan program kerja maupun kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah desa.

Studi efektivitas kebijakan dalam penelitian ini dapat ditelaah dengan teori Implementasi Kebijakan milik George Edward III. Pada Teori Implementasi Kebijakan milik Edward III ini memberikan pemahaman terkait kiat-kiat birokrasi yang baik dengan melihat tingkat keberhasilan sebuah kebijakan yang dirancang serta dijalankan oleh pemerintahan. Dalam sebuah pemerintahan harus mampu juga melahirkan kebijakan yang dapat secara maksimal dijalankan oleh seluruh elemen yang ada dibawahnya agar mampu dijalankan dengan maksimal juga perlu yang namanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat desa agar mencapai titik maksimal atau efektif. Dengan komunikasi yang baik oleh pemerintah, diharapkan mampu timbul kesadaran akan pentingnya menjalankan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan. George Edward III dalam teorinya menjelaskan terkait

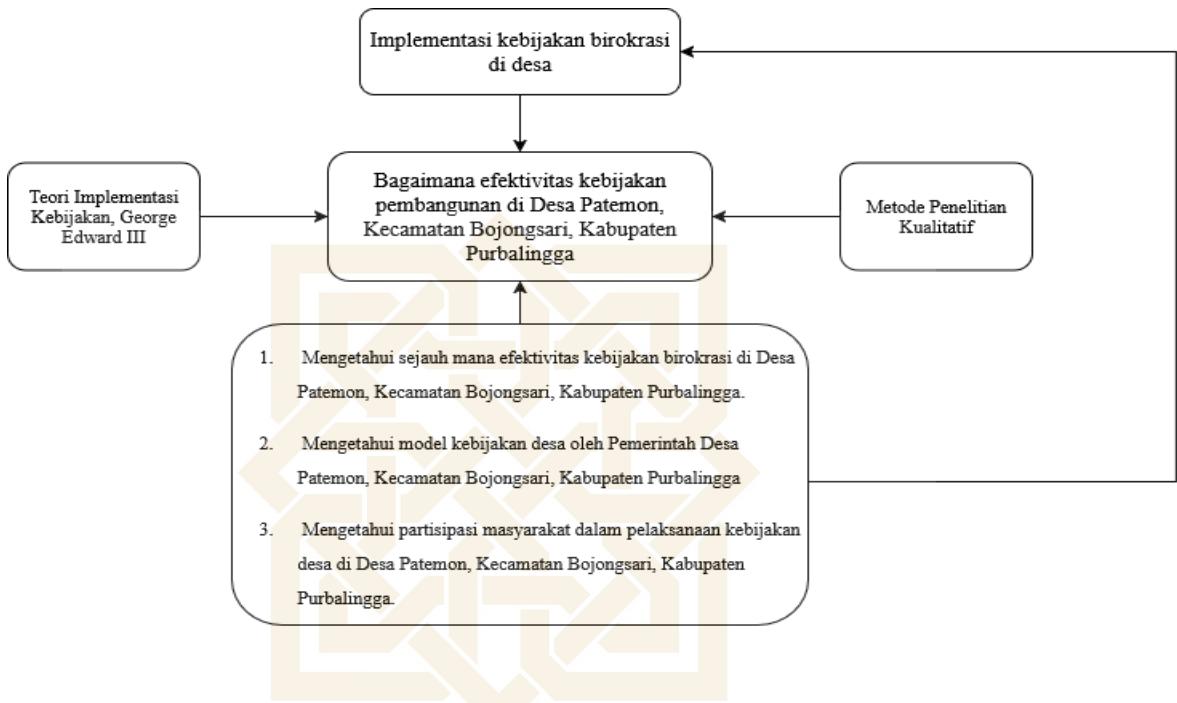
⁴¹ Tiwa, Pasomah, and Londa, “Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan.”

bagaimana kebijakan dapat terimplementasi dengan baik dan mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh elemen yakni dengan cara komunikasi yang baik pula. Disisi lain, perlu adanya pemanfaatan sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi yang sehat guna memaksimalkan implemetasi kebijakan yang telah dirancang bersama.

Teori Implementasi Kebijakan Birokrasi Milik G. Edward III ini peneliti jadikan alat analisis dalam penelitian terkait efektivitas kebijakan birokrasi di Desa Patemon karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dimana pemerintah desa selaku pemegang birokrasi tertinggi di tingkat desa berjalan semestinya dan mampu memberikan kebijakan yang efektif bagi seluruh elemen yang ada di desa. Dengan mengedepankan dan memaksimalkan komunikasi secara vertikal antara pemerintah desa dan masyarakat desa, hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan kebijakan birokrasi di Desa Patemon. Maksimalnya kebijakan birokrasi desa juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memaksimalkan potensi yang ada di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga,

Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Studi Efektivitas Kebijakan Birokrasi di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga” ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III untuk membantu dalam menganalisis penelitian yang diteliti oleh peneliti.

3. Kerangka Berpikir



Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir

Dari inti permasalahan yang ditentukan oleh peneliti mengenai kefektifan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan kebijakan desa. Peneliti kemudian merumuskan pertanyaan penelitian yakni bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan desa di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga. Kemudian untuk menganalisis pertanyaan peneliti tersebut, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan milik George Edward III, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data-data dan fakta sosial di lapangan. Proses tersebut dilakukan guna menemukan hasil penelitian antara lain:

1. Mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan birokrasi di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui model kebijakan desa oleh Pemerintah Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.
3. Mengetahui Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. M. Sobry Sutikno, Prosmala hadi (2020) Saputra menyebutkan bahwa penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum.⁴² Kendati demikian, definisinya dapat disimpulkan lebih komprehensif-integratif melalui penelusuran definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, sehingga membentuk sebuah definisi yang utuh.⁴³ Metode kualitatif mengedepankan strategi penelitian yang menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep karakteristik, indikator, simbol dan deskripsi suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik, fokus pada kualitas dengan berbagai metode, serta dijadikan secara naratif. Menurut Sugiyono (2011: 56)

⁴² M.Pd. Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁴³ Rizal Safrudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.⁴⁴

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.⁴⁵ Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan data, peneliti menganalisis data yang

⁴⁴ S.Pd. Albi Anggitto dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

⁴⁵ Syamsul Adi Arifien, “Penggunaan Bimbingan Dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo to Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.

dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran lebih dalam mengenai sebuah kasus. Oleh karena itu, metode studi kasus merupakan metode yang berguna untuk memahami dan mendalami situasi atau kasus tertentu seperti pengimplementasian kebijakan dalam pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti menyelidiki lebih jauh terkait pola pemerintahan, dampak, dan efektivitas pemerintahan desa menggunakan cara pandang teori implementasi kebijakan George Edward III.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti. Peneliti memilih lokasi penelitian bertempat di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun)Desa Patemon menyebutkan bahwa Desa Patemon termasuk kedalam golongan desa maju dengan skor IDM 0.7989. namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya bahwa kebijakan di sektor pembangunan masih diangka 50% yang membuat masih banyak kendala yang perlu diselesaikan guna mencapai kemaksimalan dalam sebuah kebijakan. Berdasarkan kondisi yang tidak berbanding lurus ini membuat peneliti memutuskan untuk menjadikan Desa Patemon sebagai lokasi penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan sebagai bentuk aktif dalam penelitian. Subjek berperan untuk memberikan informasi dan tanggapan terkait data yang diperlukan peneliti. Pada penelitian ini, kriteria subjek penelitian diantaranya:

- a. Pemerintah Desa Patemon
- b. Kepala Dusun di Desa Patemon
- c. Masyarakat yang dituakan atau ditokohkan di Desa Patemon

Sedangkan objek penelitian adalah sudut pandang suatu permasalahan yang ingin diteliti. Objek adalah sesuatu yang akan diteliti yakni orang dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan topik penelitian. Adapun objek pada penelitian ini adalah mengukur seberapa efektif peran pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan desa.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan lewat wawancara, observasi, dan diskusi terfokus.⁴⁶ Pemilihan pertanyaan seputar penerapan kebijakan desa dalam pelaksanaan yang efektif serta

⁴⁶ Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 67, <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>.

efisien. Dampak dari efektivitas penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa juga akan menjadi daftar pertanyaan wawancara yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.⁴⁷ Sumber data pendukung antara lain artikel dalam media massa, buku, karya ilmiah, publikasi organisasi dan pemerintah, jurnal, dan hasil penelitian baik yang dipublikasikan maupun tidak sebagai pendukung data primer. Dalam hal ini, peneliti menggunakan artikel, buku dan jurnal mengenai implementasi kebijakan desa yang digunakan sebagai referensi, data tambahan serta pendukung data primer yang telah diperoleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Lapangan

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian

⁴⁷ Arviyanda, Fernandito, and Landung.

pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.⁴⁸ Observasi digali melalui situasi dimana peneliti akan melakukan observasi yang melibatkan tiga objek sekaligus yakni lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran tertentu, dan aktivitas kemasyarakatan di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik dan orientik.⁴⁹

⁴⁸ Rizky Kawasati Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sorong* 21, no. 58 (2022): 99–104, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

⁴⁹ Iryana.

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam pengambilan data penelitian. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua informan.⁵⁰ Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelumnya sudah disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat berubah ketika wawancara berlangsung. Sehingga diharapkan mampu membantu peneliti dalam pengambilan dta yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung dengan pihak terkait yakni pemerintahan desa serta masyarakat desa yang dituakan atau tokoh masyarakat desa sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Wawancara akan dilakukan pada Juni 2025 hingga Juli 2025 dengan informan sebanyak 10 orang. Kriteria informan yang peneliti wawancarai yakni:

1. Pemerintah Desa sebanyak 3 orang
2. Tokoh Masyarakat Desa 2 orang
3. Kepala Dusun 2 orang
4. Masyarakat Desa 3 orang

⁵⁰ Nanda Akbar Gumilang, “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya,” n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

Alasan Peneliti memilih informan tersebut didasarkan pada hasil observasi yang mendalam di Desa Patemon, Bojongsari. Dimana peneliti mencoba menggabungkan sudut pandang antara pemerintahan desa yang diwakili oleh Kepala Desa serta Sekertaris Desa. Sedangkan Tokoh Masyarakat yang peneliti pilih berasal dari tokoh agama dan masyarakat yang ditokohkan di Desa Patemon. Hal ini dikarenakan dua tokoh tersebut yang memang menjadi teladan bagi masyarakat Desa Patemon. Lalu kepala dusun peneliti masukan dalam kriteria informan yang peneliti wawancarai karena mereka memberikan sudut pandang kemasyarakatan dengan sudut pandang yang lebih kecil yakni lingkungan dusun. Kemudian yang terakhir yakni masyarakat desa yang terdampak kebijakan. Peneliti masukan kedalam kriteria informan guna mencari data yang lebih konkret bagi penelitian ini. Oleh karena itu, pemilihan informan tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai isu yang peneliti ambil pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵¹

6. Validitas Data (Triangulasi)

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data yang dikumpulkan selama riset. Dalam riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun kelapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis –interpretatif data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh kejemuhan data.⁵²

Teknik triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data atau sumber yang berbeda untuk meningkatkan keakuratan dan validitas temuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi dengan memanfaatkan berbagai sudut pandang dan persepsi yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya. Metode yang

⁵¹ Anggraeni, “Metode Penelitian,” *Repository.Iainpare*, 2021, 32–41, <http://repository.iainpare.ac.id/2456/4/15.2300.073.BAB.203.pdf>.

⁵² Atina Nuzulia, “Krisyantono: Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

digunakan terutama adalah perbandingan antara data wawancara dan data observasi.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemeriksaan data serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data meliputi proses mereview, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus dan berulang-ulang.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Analisis data digunakan untuk mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi analisis deskriptif, yang diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya.⁵³ Miles dan Huberman mengungkapkan pola umum analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

⁵³ Firman, “Analisis Data Dalam Kualitatif,” *Article*, no. 4 (2015): 1–13.

Analisis data yang melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penghapusan informasi yang perlu untuk memproses data sedemikian rupa sehingga mengarah kepada kesimpulan akhir. Reduksi data bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sehingga kompleksitas data akan lebih teratur dalam bentuk yang baru. Proses ini terkait dengan eksplorasi tingkat keefektifan pemerintahan desa dalam melaksanakan kebijakan desa guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna baik secara emik maupun etik, baik terhadap unsur-unsur maupun totalitas. Penyajian data bertujuan menyajikan informasi yang dikumpulkan setelah disusun, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Data kualitatif dapat berbentuk catatan lapangan dan teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan dari data yang telah diperoleh kemudian diverifikasi dengan uji kebenaran, kekuatan, dan kecocokan sehingga akan mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan akan disertai dengan saran, bagian-bagian tertentu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima BAB yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II, berisi mengenai pembahasan gambaran lokasi penelitian dan profil informan dalam penelitian “Studi Kebijakan Efektivitas Kebijinakan Birokrasi di Desa Patemon, Bojongsari, Purbalingga”

BAB III, berisi mengenai jawaban tujuan dari penelitian. Pertama, mengetahui Tingkat efektivitas penerapan kebijakan desa oleh pemerintahan Desa Patemon. Kedua, mengetahui Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan desa guna meningkatkan sinergitas dan kesejahteraan bagi seluruh elemen yang ada di desa. Ketiga, mengetahui sejauh mana pemerintahan desa melakukan tugasnya sebagai kewarganegaraan formal dan pemberi pelayanan publik bagi masyarakat Desa Patemon.

BAB IV, berisi tentang inti dari analisis data yang ada di lapangan dengan didukung menggunakan teori Implementasi Kebijakan milik George Edward III.

BAB V, merupakan bagian penutup yang berisi Kesimpulan dan saran
kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian dengan judul *Studi Efektivitas Kebijakan Birokrasi di Desa petmon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga* ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas kebijakan terkhusus kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Patemon. Dalam penelitian ini berhasil memberikan gambaran mengenai konsep implementasi kebijakan di dalam sebuah birokrasi pemerintah desa yang di dalamnya terdapat dinamika sosial antar elemen yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan hingga efektif.

Implementasi kebijakan menjadi alternatif dalam membahas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pataemon. Dalam hal ini, implementasi kebijakan berperan sebagai pisau analisis guna mencapai efektivitas dari program kerja yang telah dirumuskan oleh pemerintah Desa Patemon. Komponen dari implementasi kebijakan yakni terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat komponen ini tidak hanya saling melengkapi namun juga saling terhubung satu sama lain. Hal ini diperlukan sebagai bentuk atau upaya mencapai tingkat efektif bagi sebuah program kerja yang sudah dirumuskan.

Pada aspek komunikasi, pemerintah desa selaku implementor kebijakan telah melakukan komunikasi dengan maksimal baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat

koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna menyalurkan informasi kepada masyarakat desa maupun mewadahi segala kebutuhan masyarakat desa. Segala kendala yang terjadi dalam melaksanakan sebuah kebijakan juga dikomunikasikan oleh pemerintah desa dalam sebuah rapat evaluasi yang rutin diadakan setelah melaksanakan sebuah kebijakan. Lalu pada aspek struktur birokrasi ini telah dibentuk dengan maksimal dan melihat kebutuhan yang ada di Desa Patemon. Pemerintah Desa Patemon yang dipimpin oleh kepala desa telah membentuk struktur yang strategis yang dibuktikan dengan dilaksanakannya *job desk* secara maksimal oleh para perangkat desa. Selanjutnya yakni dari aspek disposisi yang mengarah pada individu dalam diri perangkat desa masing-masing. Para perangkat desa memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang ada. Perangkat desa mencoba untuk memaksimalakan kebijakan yang sedang atau akan dijalankan. Meski dalam realitanya, kebijakan pembangunan baru mencapai angka 50% terlaksana dikarenakan ada beberapa kendala yang muncul seperti kendala geografis, ketersediaan alat, dan ketersediaan anggaran. Lalu yang terakhir yakni aspek sumber daya yang dimana dalam penelitian ini mengerucut kepada sumber daya manusia yang ada di Desa Patemon. Masyarakat Desa Patemon memiliki ketersediaan sumber daya yang terbilang menjanjikan yakni dengan adanya beberapa lokasi strategis untuk mengembangkan potensi. Dalam realitanya, masyarakat Desa Patemon juga masih mengikuti aturan yang ada dan mengikuti perintah yang diperintahkan oleh pemerintah Desa

Patemon. Namun dalam beberapa hal, masyarakat Desa Patemon masih belum paham akan urgensi dan belum paham akan resiko dari segala bentuk kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Patemon. Hal ini mengakibatkan kerap terjadi konflik dengan intensitas kecil antara masyarakat dengan pemerintah desa. Namun, pemerintah desa telah meminimalisir hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi Tingkat partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan baik partisipasi abstrak maupun non abstrak. Adanya implementasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Desa Patemon menjadi pendukut terlaksananya kebijakan pembangunan yang tidak hanya efektif namun juga *on point* dan tepat sasaran guna mengsejahterakan masyarakat Desa Patemon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka- saran-saran yang dapat diberikan dalam menciptakan keefektivitasan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Desa Patemon adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Patemon selaku implementor kebjakan pembangunan diharapkan untuk lebih mempertimbangkan tingkat terlaksananya sebuah kebijakan pembangunan untuk memaksimalkan apa yang sudah direncanakan. Disisi lain, pemerintah Desa Patemon diharapakan untuk mampu menjaga pola komunikasi yang baik kepada seluruh elemen untuk

membantu memaksimalkan kebijakan yang sudah direncanakan bersama.

2. Bagi masyarakat Desa Patemon diharapkan untuk lebih peka terhadap kebutuhan sesama dan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakannya. Sehingga tidak terjadi konflik yang berdasarkan kesalahpahaman antar satu sama lain dan mampu berepran aktif dalam segala bentuk kebijakan terkhusus kebijakan pembangunan di Desa Patemon
3. Bagi kepala dusun dan tokoh masyarakat Desa Patemon diharapkan mampu menjadi penghubung yang baik kepada masyarakat guna terjalin keharmonisan dan mampu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan di Desa Patemon.
4. Bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian di dalam pemerintahan Desa Patemon, hendaknya melakukan pendekatan dan observasi yang mendalam dengan pemerintah desa dan seluruh elemen yang ada di Desa Patemon. Hal ini diperuntukan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan berdasarkan realita yang ada. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi kepenulisan maupun analisis. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan dalam meningkatkan

keefektivitasan kebijakan pembangunan ataupun tema yang terkait secara lebih mendalam dan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Pertama. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anggraeni. "Metode Penelitian." *Repository.Iainpare*, 2021, 32–41.
<http://repository.iainpare.ac.id/2456/4/15.2300.073.BAB.203.pdf>.
- Angkasawati. "Masyarakat Desa." *Publiciana* 8 (2015): 1–23.
- Arifien, Syamsul Adi. "Penggunaan Bimbingan Dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo to Male Dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 12 Bandar Lampung)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.
- Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 67. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>.
- Aveling, Edward, Hinrich Kuhls, Allan Thurrott, Bill Mcdorman, and Bert Schultz. "A Critique of Political Economy" I, no. 2008 (2015).
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga." Mata Pencaharian, 2015.
<https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/6/54/1/mata-pencaharian-penduduk-10-tahun-keatas.html>.
- Budiono, Puguh. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jurnal Politik Muda* 4, no. 1 (2015): 116–25.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>.
- dan Sakinah Fathrunnadi Shalihati, Sutomo, Kata Kunci, and Pengembangan Wilayah. "Kajian Kemiskinan Dan Perkembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif Geospatial." *Sutomo Dan S.F. Shalihati* 1 (2015): 7–22.
- "Desa Patemon, Kec. Bojongsari, Purbalingga," 2024.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Patemon Tahun 2019-2025*. Purbalingga, 2019.
- Firman. "Analisis Data Dalam Kualitatif." *Article*, no. 4 (2015): 1–13.
- Gillin, J.L. Gillin and J.P. *Cultural Sociology*. Macmillan, n.d.
- Gumilang, Nanda Akbar. "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya," n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.
- Hajar, Siti, Khaidir Ali, and Agung Saputra. "Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar." *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6 (2022): 136–42.

- Hasnop Putra Minang, Kumba Digidewiseiso, Eko Sugiyanto. "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Di Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman." *Jurnal Ilmu Dan Budaya Unas* 42 (2021): 6.
- Hutchinson, J. *Street Level Bureaucracy*. EBSCO Research Starters, 2025.
- III, George C. Edward. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Imam Syaefullah. "Sejarah Kebudayaan Kabupaten Purbalingga." sorotnuswantoro Indonesia, 2020.
- Iryana, Rizky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sorong* 21, no. 58 (2022): 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Iswahyudi. "Perilaku Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Governance and Politics (JGP)* 2, no. 1 (2022): 1–9. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/222>.
- JASMINE, KHANZA. "Masyarakat Desa Dan Pola Hidup Interaktif." *Pedesaan Dan Kehidupan Interaktif Masyarakat Desa Dalam Pola Bermasyarakat*, 2014, 1–11.
- Larry Diamond. *Developing Democracy*. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Madani, Muhlis, Muhammad Irvan Nur Iva, and Iswadi Amiruddin. "Peran Street Level Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 3 (2021): 333–43. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.
- Malik, Sofian. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2020): 325–43.
- Martin, Benjamin Rohr and John Levi. "American Sociological Review." *A Jurnal of The American Sociological Association* 90 (2025).
- Muhammad Hasan, Farih Darmawan, Firmansyah, Sa'idah el adawiyah, Abdul Nadib, Harifudin, Andi Hartati, Ali Shodiqin, Fanji Farman. *Desa Dan BUMDes*. Jakarta, 2019.
- Mulyono. "Model Implementasi Kebijakan George Edward III." Magister Administrasi Publik, 2009.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2020): 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.

- Nainggolan, R. "Implementasi Kebijakan Dan Faktor Keberhasilannya." *Jurnal Universitas Medan Area*, 2017, 19–49.
- Nardin, Yulianus. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): 140–45.
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>.
- Nia Agustina, Esa Esa, and Mohamad Yusuf. "Model Kelembagaan Pemerintah Desa." *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 201–9. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>.
- Nuzulia, Atina. "Krisyantono: Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.
- "Pengertian Kebijakan," 2017. <https://id.wiktionary.org/wiki/kebijakan>.
- "Peraturan, Keputusan, Dan Kebijakan Pemkab Purbalingga." Portal PPID Kab. Purbalingga, 2020.
- Pramudy, Fathur Rizky, Prilla Marsingga, and Hanny Purnamasari. "Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2129–33. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3602/http>.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Putra, Handi Sandi. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Goverence Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, 2020.
- Rohi, Rudi. "Pemerintahan Desa 'Dilema Street Level Bureaucracy Dan Otonomi Desa.'" *Jurnal Civicus*, 2010.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah. "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 18–33.
<https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>.
- Saputra, Aditya, M Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, Stevie Husein, Syahid Nur Khotib, and Saiful Ridwan. "Pemetaan Partisipatif Potensi Untuk Arahan Pengembangan Desa Patemon Kabupaten Purbalingga." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 341–54.
<https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7518>.
- Sepyah, Sepyah, Hardiyatullah Hardiyatullah, Hamroni Hamroni, and Nurman

- Jayadi. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembuatan Kebijakan Publik Terhadap Penguatan Demokrasi Desa." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 1–12.
<https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.108>.
- Setiawan, Guntur. "Peran Implementasi Pembelajaran Dalam Meingkatkan Semangat Belajar," 2016, 1–23.
- Syahruddin. *Konsep Dan Teori Implementasi Kerbijakan Publik*. Indonesia: Nusamedia, 2021.
- Syawal, Ahmad, Muhlis Madani, and Nuryanti Mustari. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar." *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 3, no. 2 (2021): 93–107.
<https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.5941>.
- Tiwa, Rizky Cristiano, Johnny H Pasomah, and Very Y Londa. "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* IX, no. 3 (2023): 339–50.
- Ulumiyah, Ita, Abdul Juli Andi Gani, and Lely Indah Mindarti. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 5 (2019): 890–99.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014," 2014.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Waworundeng, Welly, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, and Samugyo Ibnu Redjo. "Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.221>.
- Wijayanti, D. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," 2018, 13–48. <https://repository.uin-suska.ac.id/13785/>.
- Wijayanto, D. "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Desa." *Diktum: Jurnal Hukum, Politik Dan ...*, 2024.
<https://ejournal.mediapenamandiri.com/index.php/jhpi/article/view/67%0Ahttps://ejournal.mediapenamandiri.com/index.php/jhpi/article/download/67/26>.
- William N. Dunn. *Public Policy Analys*. Edited by Pearson Education. 05 ed. New York: Routledge, 2016.